



PEMERINTAH
KABUPATEN BATU BARA

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Batu Bara

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



<https://bkad.batubarakab.go.id/>



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara (BKAD) dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara, sesuai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka BKAD Kabupaten Batu Bara sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Dengan tersusunnya RENJA BKAD ini, maka tersedia bahan untuk Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Tentunya kita berharapan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Batu Bara sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renja BKAD Mempunyai arti yang strategis dalam mendukung dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

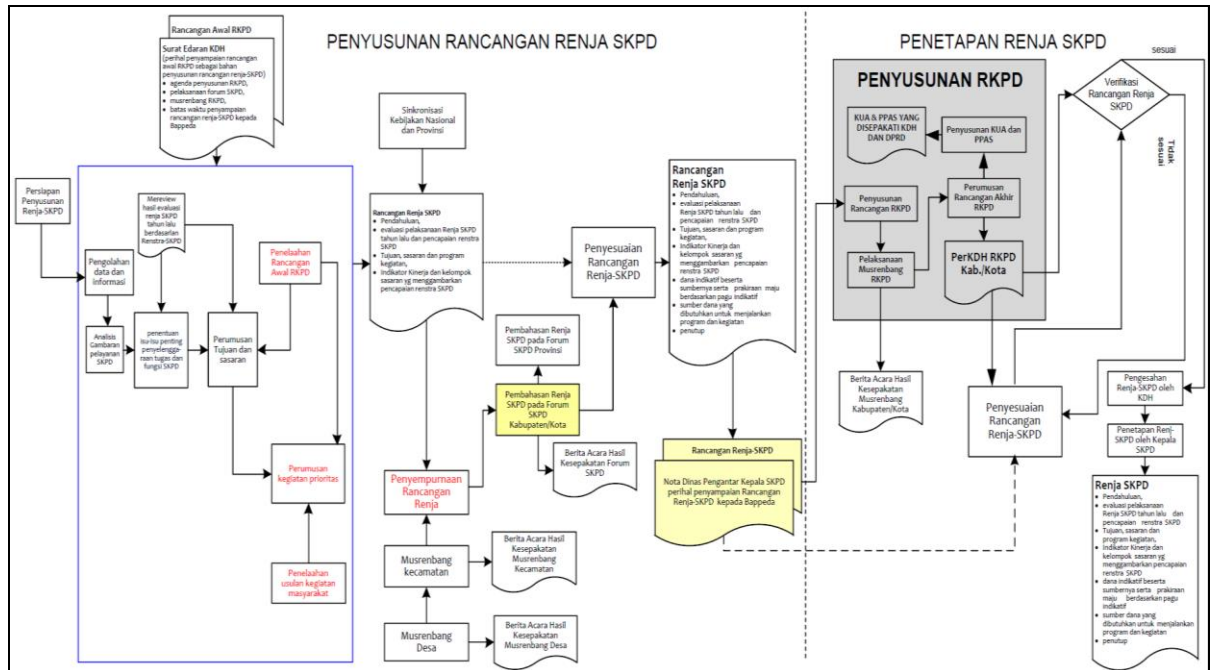
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi, dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja BKAD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan

3. Program dan kegiatan dalam Renja BKAD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini:



Rencana Kerja BKAD merupakan dokumen perencanaan resmi BKAD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik BKAD dan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Rencana Kerja BKAD yang mempunyai arti strategis dalam bidang pembangunan Daerah.

Secara umum Renja BKAD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang perlu dikembangkan dan yang hendak dicapai BKAD dalam satu tahun ke depan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renja BKAD Kabupaten Batu Bara bagian dari Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara.

Selain itu Renja BKAD Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu perangkat dasar untuk ketercapaian pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan

dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan Tujuan dibentuknya Renja BKAD antara lain :

a) Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan/program dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

b) Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja BKAD adalah :

- Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun;
- Untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022.
- Dengan disusunnya Renja BKAD kita dapat lebih bisa meningkatkan kinerja kegiatan/program yang ada di BKAD Kabupaten Batu Bara.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BKAD Kabupaten Batu Bara dalam menyusun Program Kegiatan.

Dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sesuai Renstra 2019-2023 Indikator Kinerja Utama BKAD Kabupaten Batu Bara adalah Opini BPK, persentase asset dalam kondisi baik, serta nilai AKIP. Sedangkan pada Renstra 2024-2026 Indikator Kinerja Utama BKAD Kabupaten Batu Bara adalah Opini BPK dan nilai AKIP. Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKAD dan Pencapaian Renstra BKAD sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Batu Bara dapat di lihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : BKAD Kabupaten Batu Bara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Nilai AKIP	B	B	B	-		BB			
5.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan perencanaan kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16	8	8	8	100%	12	16	12	100%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan terkait capaian dan realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	7	7	7	100%	3	14	3	100%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN gaji	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24	12	12	12	100%	43	24	43	100%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1	1	100%	8	2	8	100%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran yang disusun	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran SKPD yang disusun	36	18	18	18	100%	18	36	18	100%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.012.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan		130	65	65	65	100%		130		100%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	86	43	43	43	100%	43	86	43	100%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		daerah	daerah									
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	12	12	12	100%	69	24	69	100%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	12	12	12	100%	5	24	5	100%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24	12	12	12	100%	540	24	540	100%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	12	12	12	100%	160	24	160	100%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	29	0	32	32	100%	48	32	48	100%
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	1	1	100%	0	1	0	100%
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	50	50	50	100%	38	100	38	100%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			yang Disediakan										
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	12	12	12	100%	2	24	2	100%	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	12	12	12	100%	66	24	66	100%	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	12	12	12	100%	0	24	0	100%	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	12	12	12	100%	55	24	55	100%	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4	2	2	2	100%	16	4	16	100%	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4	2	2	2	100%	16	4	16	100%	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan review RKA SKPD/ Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	86	43	43	43	100%	38	86	38	100%	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan review DPA SKPD/ Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	86	43	43	43	100%	38	86	38	100%	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen penyusunan PERDA tentang APBD dan PERBUP tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12	6	6	6	100%	6	12	6	100%	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah dokumen penyusunan PERDA tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	12	6	6	6	100%	6	12	6	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	PERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penjabaran Perubahan APBD										
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	40	20	20	20	100%	20	40	20	100%	100%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300	150	150	150	100%	150	300	150	100%	100%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	130	65	65	65	100%	65	130	65	100%	100%
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen pemroses penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12000	6000	6000	6000	100%	6000	12000	6000	100%	100%
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pematangan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	200	100	100	100	100%	100	200	100	100%	100%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan utang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	80	40	40	40	100%	40	80	40	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah waktu rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24	12	12	12	100%	24	24	24	100%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	120	60	60	60	100%	24	120	24	100%
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu koordinasi penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	24	12	12	12	100%	456	24	456	100%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86	43	43	43	100%	43	86	43	100%
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan- LO dan beban yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16	8	8	8	100%	8	16	8	100%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	34	17	17	17	100%	17	34	17	100%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen konsolidasi laporan keuangan SKPD BLUD dan keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	56	48	48	48	100%	48	96	48	100%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12	6	6	6	100%	6	12	6	100%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut	Jumlah dokumen penyusunan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	40	20	20	20	100%	0	40	0	100%	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	86	43	43	43	100%	0	86	0	100%	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4	2	2	2	100%	0	4	0	100%	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4	2	2	2	100%	0	4	0	100%	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	4	2	2	2	100%	0	4	0	100%	
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen statistik keuangan pemerintah daerah yang disusun	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	6	3	3	3	100%	4	6	4	100%	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Penyerapan Belanja Daerah	Realisasi Penyerapan Belanja Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	24	12	12	12	100%	40	24	40	100%	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah waktu pencairan dana desa yang diberikan serta jumlah perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah waktu penyediaan dana tak terduga yang tersedia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan dana bagi hasil yang tersedia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	24	12	12	12	100%	12	24	12	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Capaian Program Kegiatan 2021-2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
		2021-2022	2023			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	90	90	90	-	100%	90	100%	90	100%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Inventarisasi Asset Perangkat Daerah yang disusun tepat	Persentase Laporan Inventarisasi Asset Perangkat Daerah yang disusun tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	1	1	1	100%	38	2	38	100%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	1	1	1	100%	38	2	38	100%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil investigasi (LHI) Barang Milik Daerah						38	0	38	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	60	30	30	30	100%	20	60	20	100%
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						38	0	38	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2	1	2	2	100%	5	3	5	100%
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah waktu rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24	12	12	12	100%	38	24	38	100%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	1	1	1	100%	38	2	38	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD dengan beberapa aspek/ fokus yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah.

Berikut disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan BKAD pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kabupaten Batu Bara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
2	Persenate aset dalam kondisi baik		88,24%	88,84%	89,29%	90%	92%	88,24%	88,84%	89,29%	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
3	Nilai AKIP		B	B	B	B	BB	B	B	B	B	n/a	89%	93%	88%	100%	n/a

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BKAD Kabupaten Batu Bara menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun demikian, BKAD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dapat diidentifikasi dari isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya pengelolaan keuangan daerah
 - a. Proses Integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal.
 - Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan sehingga proses penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD masih terdapat

banyak permasalahan sehingga masih menggunakan aplikasi yang lama (SIMDA).

- b. Masih perlu dilakukan penyempurnaan prosedur operasi baku (Standar Operasional Prosedur)
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan perlu disempurnakan seiring dengan terbitnya peraturan baru. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan BKAD Kabupaten Batu Bara.
 - c. Belum optimalnya penyajian data dan informasi
 - Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi. Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam penyajian sistem informasi keuangan daerah.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
 - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi. Sarana dan Prasarana dirasa kurang memadai.
 - b. Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah
 - Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak cara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.
 - c. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komputer
 - SIPD belum dapat dilakukan secara optimal karena masih dilakukan proses penyempurnaan dari Kemendagri.
 - d. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen
 - Kurang representatifnya tempat penyimpanan arsip/ dokumen menjadikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan.
 - e. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih terbatas.

- Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan maupun barang di setiap OPD se-Kabupaten Batu Bara.
- f. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah
- Masih kurangnya pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara periodik.
 - Penerapan manajemen risiko belum terlaksana secara optimal dikarenakan tidak adanya pelatihan tentang manajemen risiko.
 - Belum adanya kebijakan manajemen risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan bawahan pada setiap unit kerja.
 - Masih kurang tertibnya pelaporan realisasi keuangan dan laporan pajak pusat/daerah dari OPD.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD Kabupaten Batu Bara yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan diatas, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
- 2) Optimalisasi fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Peningkatan kapasitas Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja.
- 4) Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- 5) Penyempurnaan sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya.
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset

daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka diperoleh isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
- 4) Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
- 5) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
- 6) Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisa Kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Batu Bara

Nama Perangkat Daerah : BKAD Kabupaten Batu Bara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	KEUANGAN	Kabupaten Batu Bara			248.941.522	KEUANGAN	Kabupaten Batu Bara			248.941.522	
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Batu Bara	Nilai AKIP	BB	16.777.519	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Batu Bara	Nilai AKIP	BB	16.777.519	
5.2.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	148.253	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	148.253	
5.2.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	46.677	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	46.677	
5.2.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	25.950	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	25.950	
5.2.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	25.950	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	25.950	
5.2.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	49.676	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	49.676	
5.2.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	8.300.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	8.300.000	
5.2.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	8.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	8.100.000	
5.2.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70.000	
5.2.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	70.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	70.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.202.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 dokumen	60.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 dokumen	60.000	
5.2.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	322.552	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	322.552	
5.2.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	136.600	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	136.600	
5.2.1.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 orang	185.952	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156 orang	185.952	
5.2.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.401.334	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.401.334	
5.2.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	20.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	20.000	
5.2.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	368.699	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	368.699	
5.2.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	35.395	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	35.395	
5.2.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	267.509	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	267.509	
5.2.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	25.031	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	25.031	
5.2.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	54.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	54.000	
5.2.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	630.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	630.700	
5.2.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	4.015.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	4.015.600	
5.2.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	48 unit	3.765.600	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	48 unit	3.765.600	
5.2.1.207.5	Pengadaan Mebel	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	100.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	100.000	
5.2.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	150.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	150.000	
5.2.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.886.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.886.080	
5.2.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	9.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	9.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	192.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	192.000	
5.2.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.685.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.685.080	
5.2.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	703.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	703.700	
5.2.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	47.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	47.900	
5.2.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	95.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	95.800	
5.2.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	60.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	60.000	
5.2.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	400.000	
5.2.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000	
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Batu Bara	Opini BPK	WTP	230.364.003	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kabupaten Batu Bara	Opini BPK	WTP	230.364.003	
5.2.2.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	2.215.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	2.215.000	
5.2.2.201.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	230.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	230.000	
5.2.2.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	250.000	
5.2.2.201.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	125.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	125.000	
5.2.2.201.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	150.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	150.000	
5.2.2.201.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	125.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	125.000	
5.2.2.201.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	150.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 dokumen	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DPA-SKPD					DPA-SKPD					
5.2.2.201.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	400.000	
5.2.2.201.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 dokumen	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 dokumen	400.000	
5.2.2.201.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	70.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	70.000	
5.2.2.201.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	70.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 dokumen	70.000	
5.2.2.201.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 dokumen	75.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 dokumen	75.000	
5.2.2.201.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 dokumen	70.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 dokumen	70.000	
5.2.2.201.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85 orang	100.000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85 orang	100.000	
5.2.2.202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	93 persen	1.256.219	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	93 persen	1.256.219	
5.2.2.202.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20 dokumen	139.440	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20 dokumen	139.440	
5.2.2.202.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	150 dokumen	68.250	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	150 dokumen	68.250	
5.2.2.202.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dokumen	50.400	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dokumen	50.400	
5.2.2.202.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	65 dokumen	105.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	65 dokumen	105.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.202.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6000 dokumen	395.430	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6000 dokumen	395.430	
5.2.2.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100 laporan	78.540	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100 laporan	78.540	
5.2.2.202.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	40 dokumen	52.500	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	40 dokumen	52.500	
5.2.2.202.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21 dokumen	71.536	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21 dokumen	71.536	
5.2.2.202.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24 dokumen	185.482	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24 dokumen	185.482	
5.2.2.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	456 orang	109.641	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	456 orang	109.641	
5.2.2.203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 persen	952.831	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 persen	952.831	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.203.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 laporan	175.910	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 laporan	175.910	
5.2.2.203.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 dokumen	100.007	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 dokumen	100.007	
5.2.2.203.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 laporan	110.174	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 laporan	110.174	
5.2.2.203.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 laporan	157.449	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 laporan	157.449	
5.2.2.203.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	173.800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	173.800	
5.2.2.203.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	141.652	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 dokumen	141.652	
5.2.2.203.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	93.839	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	93.839	
5.2.2.204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	100 persen	224.139.953	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	100 persen	224.139.953	
5.2.2.204.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 laporan	250.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 laporan	250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.204.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	194.889.953	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	194.889.953	
5.2.2.204.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	18.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	18.000.000	
5.2.2.204.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	11.000.000	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 laporan	11.000.000	
5.2.3.201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Yang disusun Tepat Waktu	100	1.800.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Yang disusun Tepat Waktu	100	1.800.000	
		Kabupaten Batu Bara	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	90 persen			Kabupaten Batu Bara	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	90 persen		
5.2.3.201.1	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	150.000	Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	150.000	
5.2.3.201.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	400.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	400.000	
5.2.3.201.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	150.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	150.000	
5.2.3.201.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	450.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	450.000	
5.2.3.201.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	50.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	50.000	
5.2.3.201.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	170.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	170.000	
5.2.3.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 dokumen	250.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 dokumen	250.000	
5.2.3.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.000	
5.2.3.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	60.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	60.000	
5.2.3.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	100.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	100.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara tidak bersentuhan langsung terhadap Pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, BKAD Kabupaten Batu Bara berupaya untuk transparan dan Akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Pembangunan Daerah dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut disajikan identifikasi kebijakan nasional pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3	Politik dan Demokrasi	APBN	
4	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BKAD Kabupaten Batu Bara, maka dalam menyusun program kegiatan BKAD mengacu pada kebijakan nasional "Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi", sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Peran BKAD Kabupaten Batu

Bara berkontribusi atas pencapaian salah satu dari beberapa sasaran RPD Kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026. Program aksi yang dilakukan salah satunya adalah peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Untuk tujuan yang dimaksud adalah **“Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah”**

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran BKAD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran.

Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD / Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Batu Bara dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri

dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 direncanakan sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 72 Subkegiatan. Adapun total Kebutuhan dana / pagu indikatif BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 248.941.528.927.**

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	KEUANGAN		Kabupaten Batu Bara		247.141.528.927	APBD			247.309.170.746
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Kabupaten Batu Bara	BB	16.777.522.950	APBD		BB	16.677.522.950
5.2.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Batu Bara	100 persen	148.253.720	APBD		100 persen	148.253.720
5.2.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Batu Bara	3 Dokumen	46.676.860	APBD		3 Dokumen	46.676.860
5.2.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	3 Dokumen	25.950.000	APBD		3 Dokumen	25.950.000
5.2.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Batu Bara	3 Dokumen	25.950.000	APBD		3 Dokumen	25.950.000
5.2.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Batu Bara	3 Laporan	49.676.860	APBD		3 Laporan	49.676.860
5.2.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Batu Bara	100 persen	8.300.000.000	APBD		100 persen	8.300.000.000
5.2.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Batu Bara	42 orang/bulan	8.100.000.000	APBD		42 orang/bulan	8.100.000.000
5.2.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Batu Bara	1 Laporan	70.000.000	APBD		1 Laporan	70.000.000
5.2.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Batu Bara	16 Laporan	70.000.000	APBD		16 Laporan	70.000.000
5.2.1.202.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Batu Bara	12 dokumen	60.000.000	APBD		12 dokumen	60.000.000
5.2.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kabupaten Batu Bara	100 persen	322.552.612	APBD		100 persen	322.552.612

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Batu Bara	2 paket	136.600.000	APBD		2 paket	136.600.000
5.2.1.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Batu Bara	156 orang	185.952.612	APBD		156 orang	185.952.612
5.2.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kabupaten Batu Bara	100 persen	1.401.336.618	APBD		100 persen	1.401.336.618
5.2.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 paket	20.000.000	APBD		12 paket	20.000.000
5.2.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 paket	368.699.784	APBD		12 paket	368.699.784
5.2.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 paket	35.395.654	APBD		12 paket	35.395.654
5.2.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 paket	267.509.836	APBD		12 paket	267.509.836
5.2.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 paket	25.031.344	APBD		12 paket	25.031.344
5.2.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 dokumen	54.000.000	APBD		12 dokumen	54.000.000
5.2.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	630.700.000	APBD		12 laporan	630.700.000
5.2.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Batu Bara	100	4.015.600.000	APBD		100	3.915.600.000
5.2.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	48 unit	3.765.600.000	APBD		48 unit	3.765.600.000
5.2.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	2 Paket	100.000.000	APBD		0 Paket	-
5.2.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	20 unit	150.000.000	APBD		20 unit	150.000.000
5.2.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Batu Bara	100 persen	1.886.080.000	APBD		100 persen	1.886.080.000
5.2.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	9.000.000	APBD		12 laporan	9.000.000
5.2.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	192.000.000	APBD		12 laporan	192.000.000
5.2.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	1.685.080.000	APBD		12 laporan	1.685.080.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Batu Bara	100 persen	703.700.000	APBD		100 persen	703.700.000
5.2.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Batu Bara	1 unit	47.900.000	APBD		1 unit	47.900.000
5.2.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Batu Bara	2 unit	95.800.000	APBD		2 unit	95.800.000
5.2.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Batu Bara	60 unit	60.000.000	APBD		60 unit	60.000.000
5.2.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Batu Bara	2 unit	400.000.000	APBD		2 unit	400.000.000
5.2.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Batu Bara	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	100.000.000
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	Kabupaten Batu Bara	WTP	228.564.005.977	APBD		WTP	228.691.647.796
5.2.2.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu	Kabupaten Batu Bara	100 persen	2.215.000.000	APBD		100 persen	2.215.000.000
5.2.2.201.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	230.000.000	APBD		2 dokumen	230.000.000
5.2.2.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	250.000.000	APBD		2 dokumen	250.000.000
5.2.2.201.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Batu Bara	41 dokumen	125.000.000	APBD		41 dokumen	125.000.000
5.2.2.201.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Batu Bara	41 dokumen	150.000.000	APBD		41 dokumen	150.000.000
5.2.2.201.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Batu Bara	41 dokumen	125.000.000	APBD		41 dokumen	125.000.000
5.2.2.201.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kabupaten Batu Bara	41 dokumen	150.000.000	APBD		41 dokumen	150.000.000
5.2.2.201.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Batu Bara	6 dokumen	400.000.000	APBD		6 dokumen	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.2.201.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Batu Bara	5 dokumen	400.000.000	APBD		5 dokumen	400.000.000
5.2.2.201.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Batu Bara	1 dokumen	70.000.000	APBD		1 dokumen	70.000.000
5.2.2.201.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	70.000.000	APBD		2 dokumen	70.000.000
5.2.2.201.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	75.000.000	APBD		2 dokumen	75.000.000
5.2.2.201.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	70.000.000	APBD		2 dokumen	70.000.000
5.2.2.201.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	85 orang	100.000.000	APBD		85 orang	100.000.000
5.2.2.202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Kabupaten Batu Bara	93 persen	1.256.219.500	APBD		93 persen	1.256.219.500
5.2.2.202.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten Batu Bara	20 dokumen	139.440.000	APBD		20 dokumen	139.440.000
5.2.2.202.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten Batu Bara	150 dokumen	68.250.000	APBD		150 dokumen	68.250.000
5.2.2.202.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kabupaten Batu Bara	12 dokumen	50.400.000	APBD		12 dokumen	50.400.000
5.2.2.202.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kabupaten Batu Bara	65 dokumen	105.000.000	APBD		65 dokumen	105.000.000
5.2.2.202.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kabupaten Batu Bara	6000 dokumen	395.430.000	APBD		6000 dokumen	395.430.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.2.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kabupaten Batu Bara	100 laporan	78.540.000	APBD		100 laporan	78.540.000
5.2.2.202.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kabupaten Batu Bara	40 dokumen	52.500.000	APBD		40 dokumen	52.500.000
5.2.2.202.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Batu Bara	21 dokumen	71.536.500	APBD		21 dokumen	71.536.500
5.2.2.202.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kabupaten Batu Bara	24 dokumen	185.482.000	APBD		24 dokumen	185.482.000
5.2.2.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	456 orang	109.641.000	APBD		456 orang	109.641.000
5.2.2.203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Kabupaten Batu Bara	100 persen	952.833.477	APBD		100 persen	1.080.475.296
5.2.2.203.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kabupaten Batu Bara	2 laporan	175.910.624	APBD		2 laporan	264.706.155
5.2.2.203.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	100.007.957	APBD		2 dokumen	105.008.355

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.2.203.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kabupaten Batu Bara	18 laporan	110.174.624	APBD		18 laporan	115.683.500
5.2.2.203.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kabupaten Batu Bara	42 laporan	157.449.152	APBD		42 laporan	165.321.610
5.2.2.203.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	173.800.000	APBD		2 dokumen	182.490.000
5.2.2.203.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten Batu Bara	2 dokumen	141.652.000	APBD		2 dokumen	148.734.600
5.2.2.203.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	1 Laporan	93.839.120	APBD		1 Laporan	98.531.076
5.2.2.204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu	Kabupaten Batu Bara	100 persen	224.139.953.000	APBD		100 persen	224.139.953.000
5.2.2.204.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	250.000.000	APBD		12 laporan	250.000.000
5.2.2.204.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	194.889.953.000	APBD		12 laporan	194.889.953.000
5.2.2.204.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	18.000.000.000	APBD		12 laporan	18.000.000.000
5.2.2.204.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	12 laporan	11.000.000.000	APBD		12 laporan	11.000.000.000
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	OPINI BPK	Kabupaten Batu Bara	WTP	1.800.000.000	APBD		WTP	1.940.000.000
5.2.3.201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Yang disusun Tepat Waktu	Kabupaten Batu Bara	100	1.800.000.000	APBD		100	1.940.000.000
		Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	Kabupaten Batu Bara	90 persen				90 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.3.201.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kabupaten Batu Bara	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	160.000.000
5.2.3.201.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	1 laporan	400.000.000	APBD		1 laporan	450.000.000
5.2.3.201.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	1 laporan	150.000.000	APBD		1 laporan	160.000.000
5.2.3.201.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	1 laporan	450.000.000	APBD		1 laporan	460.000.000
5.2.3.201.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	60.000.000
5.2.3.201.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	1 laporan	170.000.000	APBD		1 laporan	180.000.000
5.2.3.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	30 dokumen	250.000.000	APBD		30 dokumen	260.000.000
5.2.3.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Batu Bara	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	30.000.000
5.2.3.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kabupaten Batu Bara	1 Laporan	60.000.000	APBD		1 Laporan	70.000.000
5.2.3.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Batu Bara	100 orang	100.000.000	APBD		100 orang	110.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
- b) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran-sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Indikator dan target capaian kinerja pada Tahun 2024 direncanakan dalam dokumen Renstra BKAD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja 2024
1	2	3	7
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	-	Opini BPK	WTP
	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Pagu indikatif sebagai wujud Kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang telah disertai Kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024. Kebutuhan pendanaan pada BKAD Kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Kebutuhan Pendanaan BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
5.2	KEUANGAN	248.941.528.927	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.777.522.950	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.253.720	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.676.860	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.950.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.950.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.676.860	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.300.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.100.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.202.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	322.552.612	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136.600.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	185.952.612	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.401.336.618	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.699.784	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.395.654	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.509.836	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.031.344	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	APBD Kab. Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
5.2.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630.700.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.015.600.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.765.600.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.207.5	Pengadaan Mebel	100.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.886.080.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.685.080.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	703.700.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.900.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.800.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	230.364.005.977	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.215.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	230.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	250.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	125.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	150.000.000	APBD Kab. Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
5.2.2.201.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	125.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	150.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	400.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	400.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	70.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	70.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	75.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	70.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.201.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.256.219.500	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	139.440.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	68.250.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	50.400.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	395.430.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	78.540.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	52.500.000	APBD Kab. Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
5.2.2.202.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	71.536.500	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	185.482.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	109.641.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	952.833.477	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	175.910.624	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100.007.957	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.174.624	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	157.449.152	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	173.800.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	141.652.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.203.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	93.839.120	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	224.139.953.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.204.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	250.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.204.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	194.889.953.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.2.204.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	18.000.000.000	APBD Kab. Batu Bara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
5.2.2.204.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.000.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.800.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.1	Penyusunan Standar Harga	150.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	400.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	150.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	450.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.8	Penilaian Barang Milik Daerah	50.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	170.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	250.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60.000.000	APBD Kab. Batu Bara
5.2.3.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	APBD Kab. Batu Bara

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 antara lain :

- a) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara
- b) Penyusunan Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini berpedoman pada Renstra BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk Tahun 2024 telah termuat dalam dokumen Renja.
- c) Penyusunan Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini juga berpedoman pada RKPD Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Renja merupakan dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan sebagai dasar penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Dalam penyusunan Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan beberapa progam, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan;
- b) Rencana Kerja BKAD Kabupaten Batu Bara dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada;
- c) Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024;
- d) Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tegal;
- e) Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh BKAD Kabupaten Batu Bara sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun rencana tindak lanjut BKAD Kabupaten Batu Bara dalam Rencana Kerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renja BKAD Kabupaten Batu Bara